

**PETA MUTU PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA SEBAGAI
HASIL BIMBINGAN TEKNIS PEMETAAN MUTU YANG
BERKELANJUTAN TENTANG APLIKASI PMP TAHUN 2016**

Zaimatus Sa'ida

Widyaiswara Muda LPMP Kalimantan Timur

Abstrak

Hasil Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu Berkelanjutan tentang Aplikasi PMP yang memberikan gambaran Mutu Pendidikan Kota Samarinda; Ada 11 capaian sub indikator dari 5 SNP kota Samarinda yang terendah: standar proses ada 5 sub indikator, standar pengelolaan ada 3 sub indikator, standar penilaian ada 2 sub indikator, standar isi ada 2 sub indikator dan standar SKL ada 1 sub indikator. Berdasarkan data hasil sub indikator 5 SNP standar proses menjadi standar yang paling bermasalah dan standar SKL menjadi standar yang capaiannya tertinggi. Berdasarkan data hasil sub indikator 5 SNP di rumuskan rekomendasi untuk perbaikan dalam proses pendidikan yang di laksanakan untuk peningkatan 5 SNP.

Kata Kunci: Peta Mutu Pendidikan, PMP

PENDAHULUAN

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pada pendidikan di Indonesia berkaitan dengan tiga bidang garapan utama yaitu: (1) pengkajian mutu pendidikan; (2) analisis dan pelaporan mutu Pendidikan; dan (3) peningkatan mutu dan penumbuhan budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Khususnya pada pengkajian mutu pendidikan, diperlukan adanya pemetaan dan penetapan langkah pencapaian mutu. Kegiatan pemetaan dilaksanakan melalui instrumen lain yang dapat menambah informasi tentang profil sekolah. Sedangkan, penetapan langkah pencapaian mutu adalah rencana sistematis, rasional, dan terukur serta dirumuskan oleh satuan pendidikan untuk memenuhi pencapaian mutu pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan adalah satu proses yang berusaha menjamin pelaksanaan proses di satuan pendidikan. Dengan penjaminan mutu pendidikan di harapkan semua yang berlangsung di sekolah berjalan sesuai dengan kriteria kriteria atau tata aturan yang telah di tetapkan, untuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, di antaranya dengan program pemetaan mutu pendidikan melalui Bimbingan Teknis yang berkelanjutan dengan menggunakan aplikasi PMP.

Pemetaan mutu pendidikan adalah satu proses pengambilan data dan penyusunan profil mutu sekolah, satuan pendidikan yang terpetakan. Prosesnya akan berlangsung dengan aplikasi yang kemudian akan di instalakan ke laptop atau computer sekolah. Pelaksanaan pengumpulan data akan di monitoring dan dievaluasi dan diharapkan seluruh sekolah dapat terpetakan mutu pendidikannya di tahun 2016. Sistem PMP ini menempel di dapodik, sehingga di harapkan sekolah pada akhirnya juga dapat mengetahui kondisi sekolahnya berdasarkan instrumen yang dijalankan dan hasil penyusunan peta mutu dapat pula di ketahui oleh sekolah, tetapi permasalahan banyak sekolah yang tidak mengetahui dan memanfaatkan data PMP ini. Sekolah dalam mengisi hanya asal-asal dan tidak sesuai kondisi riil di sekolah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Mengingat penting data tsb bagi sekolah, maka penulis tergerak untuk menuliskan Pemanfaatan Data PMP sebagai Hasil Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu yang Berkelanjutan dengan Menggunakan Aplikasi PMP di Kota Samarinda Pada Tahun 2016.

KAJIAN PUSTAKA

1. Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu yang Berkelanjutan

Bimbingan Teknis Berkelanjutan yang dimaksudkan adalah kegiatan pemetaan mutu yang diawali dengan kegiatan Bimbingan Teknis dilanjutkan dengan Monitoring Evaluasi dan diakhiri dengan kegiatan Diseminasi Hasil Pemetaan Mutu. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengawas sekolah dan kepala sekolah dilakukan oleh Fasilitator Daerah dalam hal ini widyaiswara yang sudah dilatih dengan tujuan memberikan keterampilan kepada peserta dalam melaksanakan pengambilan data mutu yang diawali dengan kegiatan sosialisasi, pengumpulan data, kunjungan ke Sekolah, penyiapan data penunjang di sekolah, pengisian instrumen, data entry, verifikasi dan validasi, perbaikan data dan monitoring dan supervisi. Pengawas sekolah yang

sudah dilatih di Bimtek memberikan bimbingan kepada 10 sekolah binaan masing masing (sesuai alokasi kab/kota), sehingga bisa terkumpul data hasil pemetaan mutu.

Peta Mutu Pendidikan

Dalam rangka memfasilitasi agar proses pelaksanaan system penjaminan mutu untuk satuan pendidikan berjalan lebih efektif dan efisien, maka adanya Aplikasi PMP diharapkan dapat memberikan fasilitasi satuan pendidikan dalam penerapan sistem penjaminan mutu dalam rangka memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Aplikasi PMP dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kaidah-kaidah Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Di dalam aplikasi PMP tersedia kuesioner untuk setiap stakeholder sekolah yang digunakan untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Data

Aplikasi PMP

Secara teknis Aplikasi PMP bersifat komponen opsional (add ons/pengaya) dari Aplikasi Dapodik, maka Aplikasi PMP akan dapat diinstall dan berjalan jika dikomputer tersebut telah ter-install Aplikasi Dapodik. Secara otomatis Aplikasi PMP akan mengambil entitas data pokok dari Aplikasi Dapodik seperti data profil sekolah, PTK, PD dan lainnya. Selanjutnya Aplikasi PMP akan menampilkan daftar pertanyaan/kuesioner untuk masing-masing entitas data tersebut. Analisis data SNP dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu proses entry, proses pengolahan persiapan standar mutu dan proses analisis. Proses entry dilakukan oleh seluruh stakeholder (Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Komite dan Pengawas) melalui sistem aplikasi PMP yang terintegrasi dengan DAPODIK. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan standar mutu SNP yaitu 8 standar. Pada langkah ini diperlukan proses pengolahan dari database yang dikelola dalam sistem Server data PMP menjadi database baru yang memuat standar dan sub-standar (indikator) mutu kedelapan standar SNP.

HASIL BIMBINGAN TEKNIS PEMETAAN MUTU YANG BERKELANJUTAN

Pada hasil Pemetaan Mutu Pendidikan hanya bisa di peroleh data dari 5 standar yaitu Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar pengelolaan. Sementara standar pembiayaan, standar sarana prasarana dan PTK belum dapat di ambil karena kendala teknis.

Data yang dianalisis hanyalah Data PMP yang sudah lengkap pengisiannya pertanggal 31 Desember 2016 yang meliputi sudah selesai proses pengisian PMP oleh satu sekolah yaitu PMP oleh Pengawas Sekolah, PMP oleh Kepala Sekolah, PMP oleh guru, PMP oleh siswa dan PMP oleh Komite Sekolah

Hasil pengambilan data dari server di pusat oleh tim analisis pusat dapat di peroleh data PMP kota Samarinda khususnya dan propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat tahap pengembangan masing-masing sesuai lima standar nasional pendidikan (standar isi, proses, kompetensi lulusan, pengelolaan, penilaian) yang telah ditetapkan dalam permen nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Secara Nasional dapat dilihat pada gambar yang akan dibandingkan terhadap Pendidikan di Kalimantan Timur.

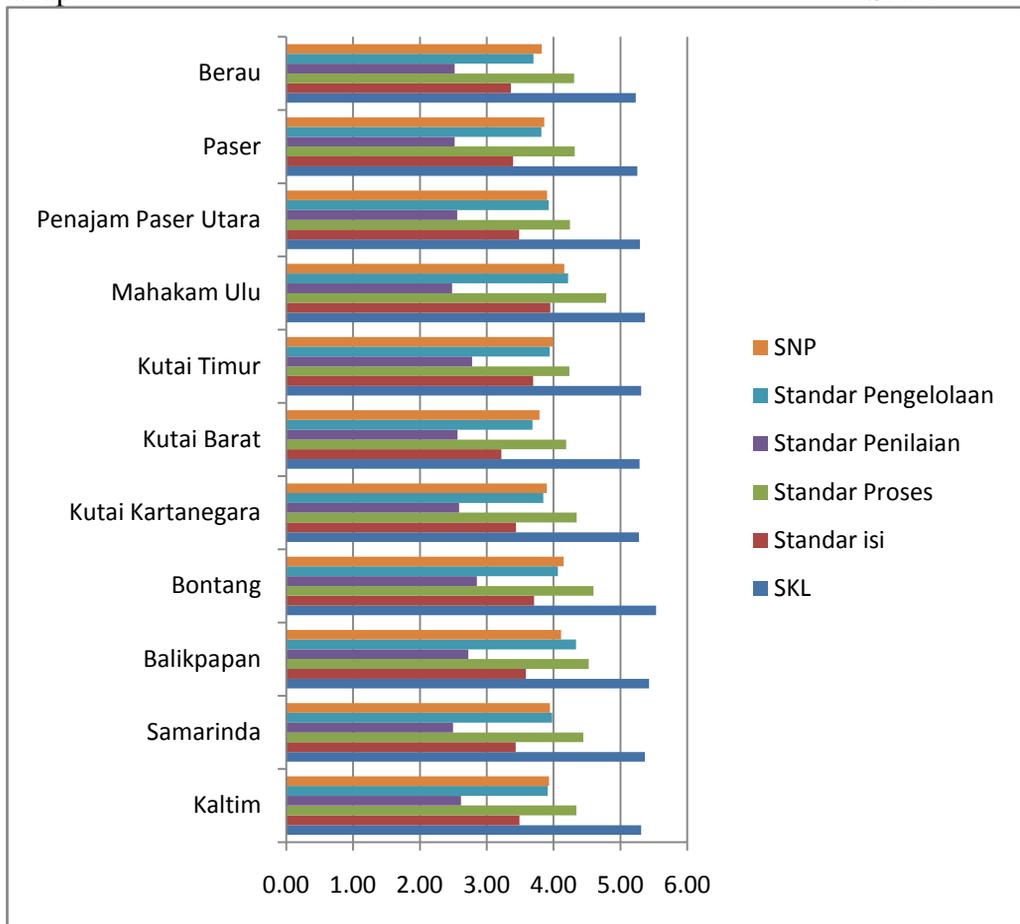
Profil Mutu Pendidikan Kalimantan Timur Tahun 2016

Tabel 3. Capaian 5 SNP Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	SKL	Standar isi	Standar Proses	Standar Penilaian	Standar Pengelolaan	SNP	Capaian
1	Kaltim	5.31	3.49	4.34	2.62	3.91	3.93	Menuju SNP III
2	Samarinda	5.37	3.44	4.44	2.50	3.98	3.94	Menuju SNP III
3	Balikpapan	5.43	3.59	4.52	2.72	4.34	4.11	Menuju SNP III
4	Bontang	5.54	3.71	4.60	2.85	4.07	4.15	Menuju SNP III
5	Kutai Kartanegara	5.28	3.44	4.34	2.58	3.85	3.90	Menuju SNP III
6	Kutai Barat	5.28	3.22	4.19	2.56	3.68	3.79	Menuju SNP III
7	Kutai Timur	5.31	3.69	4.24	2.78	3.94	3.99	Menuju SNP III
8	Mahakam Ulu	5.37	3.95	4.79	2.48	4.22	4.16	Menuju SNP III
9	Penajam Paser Utara	5.29	3.49	4.25	2.56	3.93	3.90	Menuju SNP III
10	Paser	5.25	3.39	4.32	2.52	3.82	3.86	Menuju SNP III

11	Berau	5.23	3.36	4.31	2.52	3.70	3.82	Menuju SNP III
----	-------	------	------	------	------	------	------	----------------

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sekolah sekolah di Kalimantan Timur telah mencapai tahap menuju SNP 3 dari 5 Tahapan yakni menuju SNP 1, menuju SNP 2, menuju SNP 3, menuju SNP 4 dan tahap SNP.



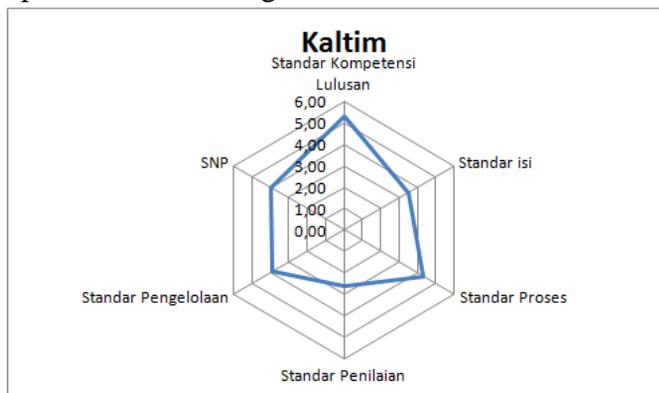
Gambar 1. Capaian Indikator dari 5 standar di Kalimantan Timur

Dari grafik di atas terlihat capaian masing masing standar dari 5 standar di Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota di Kalimantan Timur, standar pengelolaan menjadi standar dengan capaian tertinggi dan standar penilaian menjadi standar dengan capaian terendah.

Tabel 4. Capaian 5 SNP Kalimantan Timur

Standar	Kaltim
Standar Kompetensi Lulusan	5.31
Standar isi	3.49
Standar Proses	4.34
Standar Penilaian	2.62
Standar Pengelolaan	3.91
SNP	3.93

Dari tabel 4 di atas bahwa di Kalimantan Timur capaian standar SKL menjadi standar tertinggi dengan nilai 5.31 dan standar penilaian dengan capaian terendah dengan nilai 2.62.

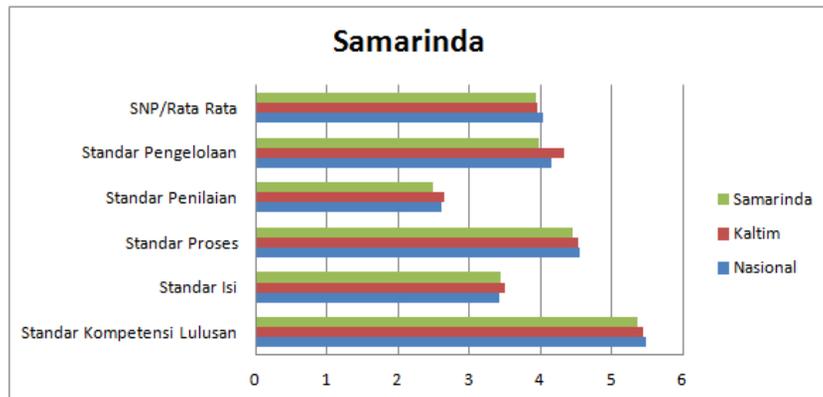


Gambar 2. Peta mutu Kalimantan Timur
Profil Mutu Capaian 5 Standar Kota Samarinda

Tabel 5. Capaian 5 SNP Kota Samarinda

Standar	Nasional	Kaltim	Samarinda	Samarinda SD	Samarinda SMP	Samarinda SMA	Samarinda SMK
Kompetensi Lulusan	5.47	5.44	5.37	5.32	5.20	5.56	5.76
Isi	3.41	3.50	3.44	3.48	3.29	3.19	3.66
Proses	4.54	4.52	4.44	4.38	4.20	4.97	4.73
Penilaian	2.6	2.64	2.50	2.47	2.48	2.57	2.62
Pengelolaan	4.16	4.34	3.98	4.00	3.79	4.03	4.15
SNP/Rata Rata	4.04	3.95	3.94	3.93	3.79	4.07	4.18
Capaian	Menuju SNP III						

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sekolah sekolah di Kota Samarinda Kalimantan Timur telah mencapai tahap menuju SNP 3 dari 5 Tahapan yakni menuju SNP 1, menuju SNP 2, menuju SNP 3, menuju SNP 4 dan tahap SNP.



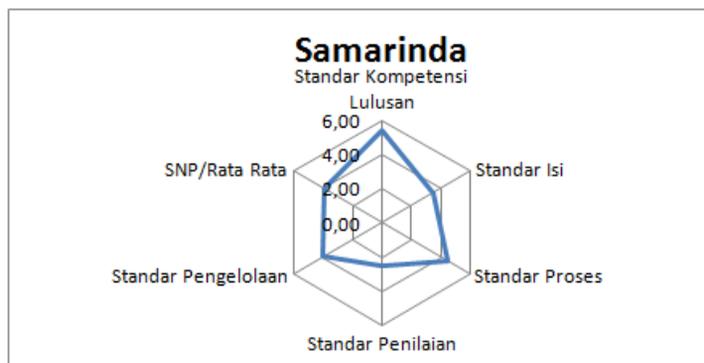
Gambar 3. Capaian 5 SNP di Kota Samarinda

Grafik diatas memperlihatkan capaian masing-masing standar dari 5 standar di Kota Samarinda propinsi Kalimantan Timur, standar SKL menjadi standar dengan capaian tertinggi dan standar Penilaian menjadi standar dengan capaian terendah.

Tabel 6. Capaian 5 SNP Kota Samarinda

Standar	Samarinda
Standar Kompetensi Lulusan	5.37
Standar Isi	3.44
Standar Proses	4.44
Standar Penilaian	2.50
Standar Pengelolaan	3.98
SNP/Rata Rata	3.94

Dari tabel di atas bahwa di Kota Samarinda capaian standar SKL menjadi standar tertinggi dengan nilai 5.37 dan standar penilaian dengan capaian terendah dengan nilai 2.50. Semua standar telah mencapai tahapan menuju SNP 3 kecuali standar penilaian dan standar isi yang baru mencapai tahap SNP 2.



Gambar 4. Capaian pada 5 SNP di Kota Samarinda

Tabel 7. Capaian Sub Indikator 5 SNP Kota Samarinda

kode_sub indikator	Sub Indikator	Samarinda
1.1.1	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6.56
1.1.10	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6.61
1.1.2	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	6.66
1.1.3	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6.56
1.1.4	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6.53
1.1.5	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6.13
1.1.6	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6.67
1.1.7	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6.40
1.1.8	Memiliki perilaku sehat jasmani	6.65
1.1.9	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6.57
1.2.1	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	2.97
1.3.1	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	5.52
1.3.2	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	4.94
1.3.3	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	5.94
1.3.4	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6.11
1.3.5	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6.54
1.3.6	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6.08
2.1.1	Mengandung muatan nasional	6.44

2.1.2	Pengembangan materi sesuai dengan prinsip-prinsip KTSP	6.20
2.1.3	Pengembangan kompetensi dasar sesuai muatan lokal	6.27
2.3.1	Memiliki perangkat pengembangan KTSP	4.33
2.3.2	Sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan	2.91
2.3.3	Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP	3.33
3.1.1	Pembelajaran mendorong peserta didik mencari tahu	4.10
3.1.10	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan	4.42
3.1.11	Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.	4.05
3.1.12	Pengelolaan kelas dan kegiatan pembelajaran dilakukan mulai awal semester hingga akhir proses pembelajaran	5.69
3.1.2	Pembelajaran berbasis aneka sumber belajar	3.30
3.1.3	Pembelajaran menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah	6.15
3.1.4	Pembelajaran berbasis kompetensi	6.39
3.1.5	Pembelajaran terpadu	6.37
3.1.6	Pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6.12
3.1.7	Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif	6.11
kode_sub indikator	Sub Indikator	Samarinda
3.1.8	pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat	6.46
3.1.9	pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	1.91
3.2.1	Guru membuat RPP	1.49
3.2.2	RPP dievaluasi oleh Kepala sekolah	4.14
3.2.3	Isi RPP sesuai dengan Kurnas	4.67
3.2.4	Penyusunan RPP melibatkan pemangku kepentingan	0.70
3.2.5	Kualitas dokumen RPP sesuai Kurnas	5.94
4.2.1	Perangkat yang terdiri dari prosedur, kriteria, dasar penilaian, instrumen dan cara perhitungan	3.50
4.2.2	Penggunaan teknik yang sesuai dengan dimensi kompetensi yang dinilai	4.33
4.3.2	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan	2.62

4.4.1	Redaksi instrumen mendidik	4.57
4.4.2	Digunakan sebagai dasar evaluasi dan ditindaklanjuti dengan remedial atau pengayaan siswa serta perbaikan proses pembelajaran	4.03
7.1.1	Dokumen pengelolaan disusun berdasarkan pemetaan kondisi sekolah serta visi, misi, dan tujuan sekolah	5.20
7.1.2	Ruang lingkup dokumen pengelolaan minimal sesuai standar	2.23
7.1.3	Perencanaan dilakukan bersama oleh Pemangku kepentingan sekolah serta disosialisasikan kepada seluruh Pemangku kepentingan sekolah	3.84
7.2.1	Kelengkapan pedoman pengelolaan sekolah	6.59
7.2.2	Penerimaan Siswa berjalan dengan obyektif, transparan, dan akuntabel	5.47
7.2.3	Penyediaan layanan konseling, ekstra kokurikuler, pembinaan prestasi dan pelacakan alumni	4.68
7.2.4	Pengembangkan program peningkatan kapasitas SDM	5.89
7.2.5	Pembentukan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan	6.51
7.2.6	Pelibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan	5.46
7.2.7	Pendidik dan tenaga kependidikan berkinerja baik	6.63
7.3.1	Sekolah memiliki program pengawasan dan disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan	2.67
7.3.2	Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasah dilakukan oleh komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan	4.89
7.3.3	Supervisi pengelolaan akademik dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah	5.32
7.3.4	Sekolah melaporkan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan	4.88
7.3.5	Sekolah melakukan evaluasi & tindak lanjut hasil pengawasan	4.77
7.5.1	Sekolah memiliki SIM	4.81

Dari tabel capaian sub indikator Kota Samarinda di atas terlihat bahwa capaian tertinggi sub indikator yaitu pada sub indikator Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab dari standar SKL

dan terendah pada sub indikator Penyusunan RPP melibatkan pemangku kepentingan dari standar proses.

Dua belas Capaian Terendah Sub Indikator 5 SNP Kota Samarinda

Tabel 8. Capaian sub indikator terendah Kota Samarinda

No	Sub Indikator	
1	Penyusunan RPP melibatkan pemangku kepentingan	0.70
2	Guru membuat RPP	1.49
3	pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	1.91
4	Ruang lingkup dokumen pengelolaan minimal sesuai standar	2.23
5	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan	2.62
6	Sekolah memiliki program pengawasan dan disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan	2.67
7	Sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan	2.91
8	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	2.97
9	Pembelajaran berbasis aneka sumber belajar	3.30
10	Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP	3.33
11	Perangkat yang terdiri dari prosedur, kriteria, dasar penilaian, instrumen dan cara perhitungan	3.50
12	Perencanaan dilakukan bersama oleh Pemangku kepentingan sekolah serta disosialisasikan kepada seluruh Pemangku kepentingan sekolah	3.84

Dari tabel di atas terlihat 12 capaian terendah dari sub indikator di Samarinda sub indikator terendah ini menjadi hal hal yang harus di perbaiki pada masa mendatang dengan serangkaian rencana peningkatan mutu. Beberapa hal yang masih berada di bawah rata rata(dari rata rata capaian menuju SNP 3 yaitu:

- a. Penyusunan RPP melibatkan pemangku kepentingan, tahap menuju SNP 1 pada standar proses
- b. Guru membuat RPP, tahap menuju SNP 1 pada standar proses
- c. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas, tahap menuju SNP 1 pada standar proses
- d. Ruang lingkup dokumen pengelolaan minimal sesuai standar, tahap menuju SNP 2 pada standar pengelolaan
- e. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan penilaian, tahap menuju SNP 2 pada standar penilaian

- f. Sekolah memiliki program pengawasan dan disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan tahap menuju SNP 2 pada standar pengelolaan
- g. Sosialisasi perangkat kurikulum kepada pemangku kepentingan, tahap menuju SNP 2, pada standar isi
- h. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif tahap menuju SNP 2 pada standar SKL
- i. Pembelajaran berbasis aneka sumber belajar tahap menuju SNP 2, pada standar proses
- j. Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP tahap menuju SNP 2, pada standar isi
- k. Perangkat yang terdiri dari prosedur, kriteria, dasar penilaian, instrumen dan cara perhitungan tahap menuju SNP 2, pada standar penilaian

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis pada bab 2 dan 3, diperoleh 20 (sepuluh) indikator yang paling bermasalah di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan dan Kab/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, untuk itu diharapkan dari hasil analisis ini dapat ditindaklanjuti dengan program-program penjaminan mutu pendidikan.

Secara umum 20 sub indikator terlemah dari 60 sub indikator dapat menggambarkan hal hal yang masih harus terus di perbaiki oleh sekolah maupun disdik kab/kota dan disdik propinsi. Berikut beberapa rincian rekomendasi dan tindak lanjut yang dirumuskan berbasis hasil pemetaan mutu pendidikan:

1. Penyusunan RPP melibatkan pemangku kepentingan

- a. Pengembangan RPP dapat di lakukan sendiri atau pun berkelompok oleh guru di dalam kelompok kerja dengan supervisi dari disdik dan pengawas sekolah. Penyusunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadikan RPP lebih kredibel.
- b. Adanya POS dalam penyusunan RPP di sekolah, bahwa RPP yang di susun dan di sampaikan dalam pembelajaran telah melalui verifikasi dan validasi oleh tim pengembangan sekolah atau tim yang di tunjuk Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah.

2. Guru membuat RPP

Kesulitan dalam menyusun RPP adalah masalah yang seringkali dihadapi dalam kehidupan pembelajaran para guru. Banyaknya kendala dalam penyusunan ini menyebabkan guru menjadi malas. Malas dalam arti kata malas menyusun RPP. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, seorang guru itu diharuskan dan diwajibkan untuk menyusun RPP. Pada RPP ini rencana pembelajaran guru tertuang. Guru dalam pembelajarannya yang sudah pasti memiliki tujuan-tujuan yang disebut tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa dicapai dengan alat RPP.

3. Ruang lingkup dokumen pengelolaan minimal sesuai standar

Administrasi sekolah adalah suatu proses keseluruhan kegiatan yang berupa merencanakan, mengatur (mengurus), melaksanakan dan mengendalikan semua urusan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Administrasi sekolah merupakan suatu proses pemanfaatan segala sumber (potensi) yang ada di sekolah baik personil (Kepala Sekolah dan stafnya serta guru-guru dan karyawan sekolah lainnya) maupun material (kurikulum, alat/media) dan fasilitas (sarana dan prasarana) serta dana yang ada di sekolah secara efektif.

Penataan administrasi bagi sekolah menjadi begitu penting sebagai sumber data utama manajemen sekolah dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya tujuan sekolah.

Secara lebih spesifik, administrasi sekolah berfungsi :

- a. Memberi arah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah
- b. Memberikan umpan balik bagi perbaikan proses dan hasil pendidikan di sekolah
- c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi sekolah
- d. Menunjang tercapainya tujuan/program sekolah secara efektif dan efisien

4. Sosialisasi perangkat kurikulum kepada pemangku kepentingan

Sejak tahun pelajaran 2013/2014, Pemerintah telah memberlakukan kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum 2013 untuk semua jenjang pendidikan mulai SD,SMP dan SMA. Penerapan kurikulum tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya, khususnya pada jenjang

Sekolah Dasar (SD) adalah desain pembelajaran yang dirancang secara tematik-integratif. Artinya semua mata pelajaran diarahkan untuk

menunjang kompetensi yang sama. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran dengan memadukan beberapa mata pelajaran melalui penggunaan tema dengan proses pendekatan saintifik dan penilaian otentik. Kompetensi yang ingin dicapai terdiri atas tiga aspek, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Perubahan tersebut mengakibatkan perubahan juga pada buku peserta didik, buku guru, sistem penilaian, pelaksanaan program remedial dan pengayaan, dan kepedulian orang tua dalam mendampingi anaknya. Perubahan ini harus diimbangi dengan sosialisasi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam proses menjalankan pendidikan karena pendidikan bukan hanya ditentukan keberhasilannya oleh sekolah tapi juga oleh orang tua dan masyarakat serta disdik.

5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan penilaian

Pelibatan secara lebih kepada pihak-pihak agar bisa dihasilkan penilaian yang lebih sesuai dengan realita sesungguhnya.

6. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif

- a. **Pengetahuan faktual** berkaitan dengan pernyataan yang benar karena sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, “anak itu sedang berjalan”, pernyataan itu faktual jika kenyataannya memang anak itu berjalan bukan sedang duduk. Seorang guru menguji pengetahuan faktual siswa jika pernyataan yang dibuatnya sesuai dengan kondisi yang senyatanya. Mengenali fakta tidak selalu mudah. Memperhatikan struktur luar suatu benda boleh jadi merupakan proses yang mudah, namun mengenali fakta yang abstrak memerlukan pengetahuan pendukung yang lebih banyak. Oleh karena itu, tingkat kesulitan mengenali fakta bersifat relatif. Di samping itu yang termasuk pengetahuan adalah definisi.
- b. **Pengetahuan konseptual** berkaitan dengan klasifikasi, kategori; prinsip-prinsip, generalisasi; teori, model dan struktur. Penguasaan pengetahuan faktual ditandai dengan kemampuan mengklasifikasikan data, mengelompokkan data berdasarkan ciri-ciri kesamaannya, atau berdasarkan perbedaannya; menunjukkan kekuatan atau kelemahan sebuah pernyataan, mengenali prinsip-

prinsip, menyimpulkan, menguasai teori, menunjukkan contoh, dan mengenali struktur.

- c. Penguasaan **pengetahuan prosedural** meliputi pengetahuan tentang keterampilan khusus, tahapan sistematis mengenai sistem program (meliputi; input, proses, dan output). Prosedur berarti tahap demi tahap suatu proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penguasaan pengetahuan prosedural berarti penguasaan proses, misalnya, siswa dapat melaksanakan penelitian melalui proses yang bertahap, yaitu (1) merumuskan pertanyaan (2) merumuskan latar belakang pemikiran (3) merumuskan hipotesis (4) menguji kebenaran hipotesis melalui eksperimen (5) analisis hasil atau menyimpulkan bahwa hipotesis benar atau salah (6) merumuskan hasil penelitian.
- d. Kemampuan tertinggi penguasaan pengetahuan adalah **metakognitif**. Metakognitif adalah “berpikir tentang berpikir”. Metakognisi terdiri atas dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman atau regulasi. Metakognitif merujuk pada proses menguasai ilmu pengetahuan dan proses berpikir. Dalam hal ini siswa dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang telah dikuasainya untuk membangun pengetahuan baru. Metakognitif bisa juga dimaknai memiliki pemahaman mengenai belajar tentang cara belajar.

7. Pembelajaran berbasis aneka sumber belajar

Perlu di tingkatkan pembelajaran oleh guru:

- a. Sumber belajar tercetak (buku, majalah, brosur, koran, poster, denah, kamus, dll)
- b. Sumber belajar noncetak (elektronik) : film, slide, video, komputer, internet, dll
- c. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas : perpustakaan, ruangan belajar, lapangan olahraga, dll
- d. Sumber belajar berupa kegiatan : wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, permainan, dll
- e. Sumber belajar berupa lingkungan dimasyarakat : taman, terminal, pasar, toko, pabrik, museum

pentingnya belajar berbagai aneka sumber adalah :

- a. Belajar memahami sebuah fakta (situasi)
- ~~b. Untuk mengetahui perkembangan informasi (pengetahuan)~~

- c. Menambah pengetahuan dan menemukan hal-hal baru
- d. Untuk mengoreksi diri (pribadi)
- e. Membuat proses pembelajaran tidak vakum (tidak membosankan)
- f. Membuat konsep yang abstrak menjadi konkrit

Disisi lain, dengan diberlakukannya belajar berbagai aneka sumber, peserta didik dapat memperoleh berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih-lebih dalam memecahkan masalah dalam kegiatan belajar-mengajar.

8. **Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP**
Diperlukan keterlibatan dari semua unsur dalam penyusunan KTSP/Kurikulum Satuan Pendidikan dengan harapan semua pemangku kepentingan dapat memahami seputar muatan kurikulum sehingga dapat memberikan dukungan semaksimal mungkin dalam pelaksanaannya.
9. **Perangkat yang terdiri dari prosedur, kriteria, dasar penilaian, instrumen dan cara perhitungan**
Perlu di gunakan perangkat perangkat yang lebih jelas dalam melaksanakan penilaian sehingga hasil penilaian bisa lebih objektif dan sesuai dengan realita sesungguhnya, tidak semata berdasarkan like or no.
10. **Perencanaan dilakukan bersama oleh Pemangku kepentingan sekolah serta disosialisasikan kepada seluruh Pemangku kepentingan sekolah**
Dilibatkannya semua unsur di sekolah dalam penyusunan perencanaan di sekolah dari Disdik, Pengawas Sekolah, Kepsek, seluruh guru dan tenaga non kependidikan, komite sekolah, orang tua dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yang Berkelanjutan, manfaat data PMP bagi dunia pendidikan di kota Samarida memberikan

gambaran sebagai berikut;

1. SD sampai SMA/SMK pada level menuju ke SNP III dari 5 standar SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar pengelolaan.
2. Standar SKL yang tertinggi dengan nilai 5.37 dan terendah pada standar penilaian dari 5 standar.
3. Capaian sub indikator Kota Samarinda yang tertinggi pada sub indikator “Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab” dari standar SKL dan yang terendah pada sub indikator “Penyusunan RPP yang melibatkan pemangku kepentingan” dari standar proses.
4. Ada 11 capaian sub indikator dari 5 SNP kota Samarinda yang terendah: standar proses ada 5 sub indikator, standar pengelolaan ada 3 sub indikator, standar penilaian ada 2 sub indikator, standar isi ada 2 sub indikator dan standar SKL 1 sub indikator.
5. Berdasarkan data hasil sub indikator 5 SNP standar proses menjadi standar yang paling bermasalah dan standar SKL menjadi standar yang capaiannya tertinggi.
6. Berdasarkan data hasil sub indikator 5 SNP di rumuskan rekomendasi untuk perbaikan dalam proses pendidikan yang di laksanakan untuk peningkatan 5 SNP.

Saran-saran

Bagi Sekolah,

1. Melalui hasil pemetaan mutu tingkat sekolah dapat di tingkatkan hal-hal yang masih kurang untuk kepentingan pengembangan kedepannya. Dapat di lakukan perencanaan untuk peningkatan mutu dan kemudian di implementasikan di sekolah
2. Melakukan kegiatan diklat, workshop, seminar, diantaranya melalui kegiatan KKG/MGMP untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah secara terus menerus, sehingga dalam proses pemetaan mutu kedepannya data capaian 5 SNP setiap sekolah dapat terus meningkat, terlebih untuk hal hal yang masih menjadi kelemahan sekolah.

Bagi Pemerintah daerah

1. Bagi Pemerintah kota Samarinda berdasarkan kewenangannya, wajib meningkatkan dan memperbaiki terutama pada penyediaan fasilitas sekolah
- ~~2. Berdasarkan hasil pemetaan sekolah yang di laksanakan dapat~~

melakukan tindak lanjut berupa program peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan 8 standar SNP.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2006. **Standar Kompetensi Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK & SLB**. Jakarta: BP. Cipta Karya
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan**
- Sudarman, Danim. 2002. **Inovasi Pendidikan: Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kependidikan**. Bandung: Pustaka Setia.